



Rilis Pers

Webinar Nasional Menakar Keberpihakan Pemerintah terhadap Perempuan: Komitmen Etik atau Gimik Politik?

Pemerintahan Prabowo Subianto menyebut 'perempuan' dalam poin keempat Asta Cita, bahwa pemerintah berkomitmen untuk "**Memperkuat** pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, **kesetaraan gender**, serta **penguatan peran perempuan**, pemuda, dan penyandang disabilitas." Kendati demikian, isu-isu krusial terkait perempuan belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Tidak tampak upaya yang signifikan dari pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perumusan kebijakan publik. Padahal, pendekatan berbasis gender penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya responsif terhadap kebutuhan perempuan, tetapi juga mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor.

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. *Webinar Nasional* bertajuk "*Menakar Keberpihakan Pemerintah terhadap Perempuan: Komitmen Etik atau Gimik Politik?*" yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025 pada pukul 09:00-11.30 WIB merupakan bentuk partisipasi LAB 45 dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2025. Kami mengevaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melihat perhatian pemerintah terhadap isu gender, serta memproyeksikan pemberdayaan perempuan selama lima tahun ke depan. *Webinar* ini menilai kebijakan pemerintah pada sektor politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dengan tiga narasumber yang memiliki perhatian khusus pada bidang tersebut dari perspektif perempuan.

Mike Verawati Tangka (Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia) memulai paparan dengan mengulik posisi isu gender yang masih sering diasosiasikan dengan peran domestik. Program-program pemerintah saat ini pun cenderung terfokus pada ranah praktis, seperti pemenuhan kebutuhan dasar. **Saat ini belum terlihat agenda-agenda strategis untuk pemberdayaan perempuan.** Bagaimana pemerintah tidak sensitif gender tercermin pada kebijakan PPN 12% dan gas melon, serta PHK massal yang banyak mengorbankan buruh perempuan. Dari sisi politik, representasi perempuan di kabinet pun rendah bahkan menurun dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, program **Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menyelesaikan masalah yang ingin dibidik yaitu *stunting*.** Pemerintah semestinya melihat hulu masalah, salah satunya dengan melakukan intervensi pada seribu hari kelahiran anak. Tantangan pemerintahan baru mencakup kapasitas tim kerja, akuntabilitas yang rendah, dan kebijakan yang tidak partisipatif. Oleh

karena itu, **penting untuk menata ulang strategi konsolidasi masyarakat dan memperkuat gerakan perempuan dengan melibatkan 'Male Allies'**.

Paparan **Salsabila Putri Pertiwi** (Redaktur Konde.co) berfokus pada aspek pendidikan dan kesehatan. Awalnya, Salsabila menyinggung survei Konde.co yang menemukan bahwa **79% responden tidak mengetahui isu perempuan yang sedang dijalankan pemerintah**. Di sektor pendidikan, program MBG justru **menggerus dana pendidikan** yang semula dipergunakan untuk memperluas akses serta menyejahterakan tenaga pengajar. Begitu pula dengan bidang kesehatan, **efisiensi berdampak pada penurunan akses perempuan terhadap layanan kesehatan**, termasuk bagi korban kekerasan yang mayoritas adalah perempuan. Salsabila menekankan bahwa isu gender berada di semua lini masa kehidupan.

Sementara itu, **Ratu Dyah Ayu Gendiswardani** (Analisis Utama Mahadata dan Gender) memperkaya pembahasan dengan penilaian dinamika dan proyeksi arah kebijakan Prabowo melalui pengarusutamaan gender (PUG). Program yang mempertimbangkan PUG memiliki dampak lebih besar karena berbasis pada data terpilah gender dan analisis kebutuhan spesifik perempuan, memastikan keadilan sosial dan inklusivitas, serta mendorong demokrasi yang lebih partisipatif. **Hari ke-0** adalah titik mengukur kebijakan yang sudah berjalan dari pemerintahan sebelumnya dan yang dibawa oleh presiden saat ini dalam bentuk Asta Cita. **Pada tahap ini, ada upaya untuk lebih responsif terhadap isu gender, tapi birokrasi yang ada masih kurang sensitif**. Akibatnya, implementasi kebijakan berbasis gender belum maksimal. Pada **hari ke-100 mengarah pada stagnasi kebijakan gender** karena terdapat tanda-tanda pelemahan yang diakibatkan dari beberapa indikator, seperti alokasi anggaran yang berkurang dan semakin sedikitnya representasi perempuan di posisi strategis dalam pemerintahan. Terakhir, terdapat **dua kemungkinan untuk proyeksi 2029**. Jika reformasi birokrasi berjalan **sesuai Asta Cita, maka terdapat peluang untuk bergerak ke arah pemerintahan yang lebih proaktif dalam menjalankan PUG**. Akan tetapi, **jika tidak ada perubahan signifikan**, posisi akan tetap stagnan atau bahkan jatuh ke skenario di mana presiden memang memiliki kebijakan PUG, namun tetap dengan bias gender yang membatasi efektivitasnya.

Webinar ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap sektor, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif.

Jaleswari Pramodhawardani
Kepala Laboratorium Indonesia 2045

Tentang Laboratorium Indonesia 2045

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

Konsentrasi riset LAB 45 adalah berbagai perkembangan seputar politik keamanan dan ekonomi politik. Topik-topik dalam studi politik keamanan meliputi politik konstituen, politik luar negeri, strategi pertahanan, keamanan maritim, radikalisme dan separatisme. Ruang lingkup kajian ekonomi politik antara lain blok perdagangan, liberalisasi ekonomi, politik fiskal dan moneter, kemaritiman, pembangunan berkelanjutan, serta peran badan usaha milik negara. LAB 45 juga membangun kapasitas dan kolaborasi dengan komunitas epistemik yang memiliki perhatian terhadap perkembangan global dan nasional.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Sekretariat LAB 45

Telepon: +62811452045

Email: lab45@lab45.id

Website: www.lab45.id

Instagram: [lab45.id](https://www.instagram.com/lab45.id)

Facebook: Laboratorium Indonesia 2045 X: [@lab45_](https://www.facebook.com/lab45_)